



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Pemberantasan Korupsi : Manipulasi Dana Sawit Lanjut Diusut
Tanggal	: Kamis, 04 Januari 2024
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

PEMBERANTASAN KORUPSI

Manipulasi Dana Sawit Lanjut Diusut

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki 2024 ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dugaan manipulasi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022.

Kasus ini diduga turut menyebabkan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat sementara industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah.

Kepastian kelanjutan penyidikan kasus itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Kuntadi, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1/2024). Ia menyatakan bahwa kasus tersebut statusnya masih tetap berjalan dan tidak dihentikan oleh penyidik. "Masih jalan," ujarnya.

Dalam penyidikan ini Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Namun, untuk pemanggilan saksi, tercatat terakhir dilakukan pada November 2023. Hingga kini, Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kuntadi pun tak menjawab ketika ditanya tentang proses penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS tahun 2015-2022 naik ke tahap penyidikan pada 7 September 2023. Penyidikan dilakukan untuk mendalami pengembangan biodiesel dengan menggunakan dana yang

dihimpun dari penerimaan pungutan ekspor kelapa sawit.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini harus disidik lebih lanjut karena ada yang tak sesuai pada perencanaan dengan kenyataan dalam penggunaan dana sawit. Akibatnya, diduga terjadi kerugian negara terkait pengembangan biodiesel.

Di sisi lain, dugaan manipulasi minyak sawit mentah tersebut berakibat pada mahalnya harga minyak goreng di masyarakat. Sementara, industri diduga menikmati keuntungan melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO). "Ini yang harus diutamakan sehingga nanti iuran yang digunakan dalam memproduksi biodiesel dapat tersalurkan dengan baik karena iuran dana sawit itu sudah menjadi uang negara," kata Boyamin.

Bisa terhambat

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zae-nur Rohman mengingatkan, bahwa sebelumnya Jaksa Agung telah memerintahkan jajaran bidang Tindak Pidana Khusus untuk menunda pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Perintah itu diyakini akan berdampak terhadap penyidikan dugaan korupsi pada pengelolaan dana sawit, termasuk kasus-kasus korupsi lainnya.

"Akibat penundaan pemeriksaan, perkara bisa terhambat. Sangat mungkin jeda waktu digunakan oleh pihak-pihak yang terkait perkara untuk menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi-saksi, atau bentuk tindakan lain untuk menghindari jerat hukum," kata Zaenur.

Memburu Harun

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mencari tersangka kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, yang hingga saat ini masih buron. Dalam upaya memburu Harun, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan, KPK sudah membangun kerja sama dengan penegak hukum lain baik di dalam negeri maupun dengan negara lain.

"Kami terus berupaya melakukan upaya pencarian semua sisa DPO (daftar pencarian orang) KPK. Tentu dengan cara dan strategi kami, yang kami kira langkahnya pun juga tidak perlu terus dipublikasikan," kata Ali saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Harun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2020 atau sehari setelah KPK menangkap bekas anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Diduga Harun telah menuap Wahyu dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

(NAD/PDS)